



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 6, Issue 1, 2024
P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TEGALGONDO KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

(Community Participation in Development in Tegalgondo Village, Karangploso District, Malang Regency)

Zidan Gapura Ramdani^{1*}, Luluk Dwi Kumalasari²

¹*Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia, Email: ramdanizidan96@gmail.com*

²*Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia, Email: -*

ARTICLE INFO

How to Cite:

Ramdani, Z. G., & Kumalasari, L. D. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 6(1), 60-71.

Keywords:

Community, Community Participation, Village Government, Development

Kata Kunci:

Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa, Pembangunan

ABSTRACT

This research is entitled Community Participation in Development in Tegalgondo Village, Karangploso District, Malang Regency. Researchers focused this research on the stages of development. As a form of community participation in Tegalgondo Village, Karangploso District, Malang Regency. The involvement of community participation is very important for the realization of village development results. In research using a qualitative research approach to the type of descriptive research. And determining the subject in this study using a purposive sampling technique. In this study, researchers collected data through interviews, observation and documentation. With the subject of the Tegalgondo village secretary, Named Mrs. Sanik. The theory used in this research is the ladder of participation theory (A Leader of Citizen Participation). The theory belongs to Sherry R. Arnstein. This study divides the stages and forms of participation into several parts. and answer the contents of Arnstein's theory. And in the discussion, two forms of community participation in Tegalgondo were found in development, including material participation and non-material participation and two types of development stages that used community participation, namely, the planning stage and the development implementation stage.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap terhadap tahapan pembangunan. Sebagai wujud dari partisipasi masyarakat di Desa Tegalgondo

* Corresponding author. Telp.: 081995826852
E-mail address: ramdanizidan96@gmail.com

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Keterlibatan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan desa. Pada penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dan penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data lewat wawancara, observasi serta dokumentasi. Dengan subjek sekretaris desa Tegalgondo, Bernama Ibu Sanik. Teori yang digunakan pada penelitian ini, teori tangga partisipasi (*A Leadder of Citizen Participation*). Teori milik Sherry R. Arnstein. Pada penelitian ini membagi tahapan dan bentuk partisipasi menjadi beberapa bagian. serta menjawab isi teori milik Arnstein. Dan pada pembahasan ditemukan dua bentuk dari partisipasi masyarakat tegalgondo terhadap pembangunan, antara lain partisipasi material dan partisipasi non material dan dua jenis tahapan pembangunan yang menggunakan partisipasi masyarakat yaitu, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas-asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola sistem pemerintahan supaya tercipta pembangunan yang bersifat efektif, kejelasan, berpengaruh dan bertanggung jawab sehingga masyarakat bisa diajak bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Pada prinsip arah pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk menyejahterakan masyarakat, begitupun dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang - undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan dalam undangundang tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan masyarakat seluruhnya dan manusia (Sulistiyorini et al., 2015).

Pembangunan yang menekankan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*) (Ricky Wirawan, Mardiyono, 2015). Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan menuju situasi yang lebih baik. dengan memanfaatkan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan (Digdowiseiso, 2020).

Pembangunan merupakan sebuah rangkaian-rangkaian suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan ke keadaan yang akan lebih baik. Dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan (Mulyana, 2012).

Akar pembangunan adalah pembangunan masyarakat atau bangsa dengan menyeluruh, demi tercapai sebuah kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus mempunyai pendidikan dan moral yang lebih baik. Kita perlu memahami pembangunan baik dari sisi input pembangunan maupun dari proses dan tujuan pembangunan, yaitu perekonomian yang baik, masyarakat yang baik dan proses politik yang baik. Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan di Negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi termasuk Indonesia bukan hal yang baru. Masyarakat harusnya diberikan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas untuk bersama - sama memecahkan persoalan yang ada. Pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa karena yang lebih tahu permasalahan seperti pembangunan infrastruktur hanyalah masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, ke ikut sertaan masyarakat menjadi sifat dari kepedulian dan kesadaran serta tanggung jawab dari masyarakat terhadap pentingnya akan pembangunan yang hanya untuk mensejahterahkan mutu hidup mereka. Melalui kerjasama yang dipercayakan kepada masyarakat, disadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan bukanlah sekadar penguguran kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun keterlibatan masyarakat sangatlah berpengaruh dalam memperbaiki kesejahteraan hidupnya (Laily, 2015).

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling utama dalam usaha mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam suatu pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan terhadap kemampuan aparatur pemerintah, namun juga berkaitan dengan usaha menjadikan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Terciptanya sebuah partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan.

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga Negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Budoyo & Hardiyanti, 2021). Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tertuang pada pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa: partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan daerah kabupaten / kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat (MUHTARDIN, 2021).

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah melihat tahapan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Keterlibatan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan desa. Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari suatu masyarakat semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), dan pikiran (ide- ide, gagasan).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan menfokuskan penelitian ini terhadap tahapan pembangunan. Sebagai wujud dari partisipasi masyarakat di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dalam pembangunan sudah beberapa infrastruktur yang sudah dibangun dengan adanya partisipasi dan masyarakat sekitar. Maka dari itu judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang"

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mencari gambaran yang teratur berdasarkan data fakta yang akurat terkait fenomena yang sedang diteliti serta memperoleh data yang lebih mendalam dan mendeskripsikan kenyataan fenomena yang diteliti. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh dan menggambarkan data mengenai "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten

Malang”.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan (RISKAYANTI, 2021).

Bagian bahan dan metode menjelaskan bahan yang digunakan dalam penelitian dan langkah-langkah yang diikuti dalam pelaksanaan penelitian. Sebuah justifikasi singkat untuk metode yang digunakan juga dinyatakan sehingga pembaca dapat mengevaluasi kesesuaian metode, reliabilitas dan validitas hasil

Menurut Irawan Suehartono penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala atau kelompok tertentu untuk melakukan hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada dimasyarakat tersebut (Irawan Soehartono, 1995).

Penelitian ini dilakukan berada di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso dengan pertimbangan di desa ini terdapat pembangunan yang banyak melibatkan masyarakat. Serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan Judul ”Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”. Ini Menyajikan data di lapangan yang berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi terkait dengan judul penelitian.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Data yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam dan observasi selama penelitian berlangsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan dokumentasi berupa foto dan arsip dokumen. Foto yang di peroleh yaitu foto langsung bersama subjek yang menjadi narasumber wawancara. Subjek dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini memperoleh melalui teknik purposive, karena teknik tersebut tepat untuk digunakan dalam menentukan kriteria subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dan sesuai dengan fokus dari penelitian ini. Adapun data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara kepada subjek penelitian dilapangan, yaitu:

Beberapa Pembangunan Di Desa Tegalondo yang telah Dilakukan

Pembangunan-pembanguna yang telah dilakukan dan telah selai prosesnya, dari jumlah 4

dusun 5 RW dan 52 RT. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek maka bisa dilihat jumlah pembangunan yang telah dilakukan oleh desa Tegalgondo antara lain:

“Kantor balai dusun, jalan yang dekat masjid sama gorong- gorongnya, ada drainase, grand house, bank sampah, ketahanan pangan, pasar wisata, posyandu.” Dari hasil wawancara kepada subjek penelitian tersebut peneliti berhasil mendapatkan bukti berupa foto untuk beberapa pembangunan tersebut.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Tegalgondo Terhadap Pembangunan Di Desa Tegalgondo

Adanya suatu partisipasi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah desa, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di desa tersebut. Adanya Adanya kesadaran berpartisipasi menuntut adanya keikutsertaan seseorang untuk terlibat secara langsung didalamnya. Diperlukan aktor perubahan agar partisipasi itu dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi ini dapat berjalan dalam mendorong perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi yang bersumber dari hasil wawancara Bersama Ibu Sanik selaku Sekretris di desa Tegalgondo. Peneliti mendapatkan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

a. Partisipasi Material

Partisipasi material adalah partisipasi yang berasal dari masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam bentuk fisik atau jasmani. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di desa Tegalgondo yaitu partisipasi yang berbentuk tenaga fisik. Diambil data dari Ibu Sanik dia mengungkapkan bahwa setiap pembangunan yang membutuhkan banyak orang dia menggunakan partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik dari orang-orang yang berada di desa Tegalgodo.

b. Partisipasi Non Material

Partisipasi non material partisipasi yang berasal dari penggunaan pikiran, ide, dan gagasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam kasus yang terjadi pada desa Tegalgondo terutama dalam pembangunan yaitu, adanya dukungan yang tercipta dari masyarakat, dilansir dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek, yaitu ibu Sanik dia mengungkapkan bahwa salah satu faktor keberhasilan yang tercipta dari pembangunan yang ada di desa Tegalgondo adalah dorongan- dorongan dari masyarakat itu sendiri berupa dukungan untuk keberhasilan dari setiap pembangunan yang diciptakan.

Tahapan Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Tahapan tahapan dalam pembangunan di desa Tegalgondo, terdapat dua macam yaitu, tahapan perencanaan pembangunan dan tahapan pelaksanaan dalam pembangunan.

a. Tahapan Perencanaan

Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan adalah melaksanakan perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang biasa dikenal sebagai MUSRENBANG. Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Tinjauan umum Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah.

Konsep musrenbang sendiri digunakan oleh desa Tegalgondo untuk melakukan pra pembangunan. Dalam tahapan perencanaan pembangunan ini sendiri desa Tegalgondo telah melibatkan partisipasi dari masyarakat, para ketua dusun, ketua RT/RW, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun diundang untuk membahas terkait pembangunan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan ini sendiri semua elemen masyarakat di libatkan dalam pelaksanaan. Dengan tahapan pelaksanaan ini partisipasi masyarakat yang ada di desa Tegalgondo berupa gotong royong. Dengan menggunakan tenaga yang ada di masyarakat menjadikan desa Tegalgondo menjadikan desa ini sebagai salah satu desa yang melaksanakan pembangunan dengan menggunakan partisipasi masyarakat. Dengan demikian salah satu faktor keberhasilan dari setiap pembangunan yang dilaksanakan adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri yang menjadikan pembangunan cepat terealisasi.

Dalam pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya menggunakan tenaga fisik sebagai satu-satunya partisipasi masyarakat yang tercipta. Ada partisipasi non fisik yang ada di setiap partisipasi masyarakat di desa Tegalgongon, salah satunya ketersediaan konsumsi gratis yang bisa dinikmati oleh para partisipasi yang menggunakan fisik. Partisipasi non fisik ini biasanya berupa makanan-makanan ringan, seperti kue-kue basah. Makanan berat yang berupa nasi. Dan terakhir minuman seperti air mineral dan kopi-kopian.

Analisis Menggunakan Teori Dari Sherry R. Arnstein

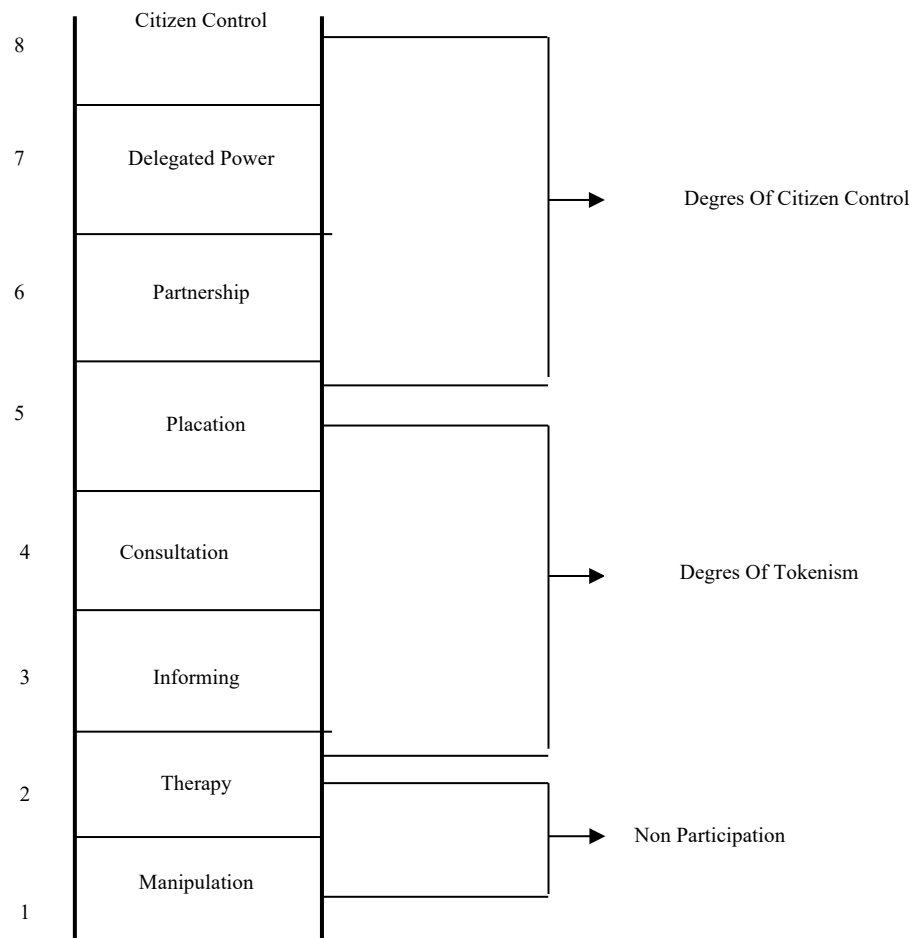
Tingkat partisipasi masyarakat merupakan ukuran sampai sejauh mana masyarakat berpartisipasi. (Arnstein R Sherry, n.d.) mengemukakan sebuah tangga partisipasi masyarakat yang sudah digunakan para akademisi untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Tangga partisipasi Arnstein mempunyai

delapan anak tangga yang terbagi dalam tiga kategori, dari yang terbawah yaitu anak tangga manipulasi dan terapi pada kategori nonpartisipasi, anak tangga penginformasian, konsultasi, dan penempatan pada kategori tokenisme, anak tangga kemitraan, pendelegasian, dan kontrol warga pada kategori derajat kekuasaan warga negara. Semakin tinggi anak tangga maka tingkat partisipasi semakin tinggi.

Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Peran serta campur tangan pemerintah sekitar dan masyarakat juga dinilai dari bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh (Agil Randio Alzuhkri, 2023).

Sherry R. Arnstein menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, dan melaksanakan (Alfandi et al., 2019).

Arnstein adalah orang yang pertama mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (*agency*). Dengan pernyataan tersebut bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*Citizen participation is citizen power*), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi dengan tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan Menurut Sherry Arnstein pada makalahnya.



Gambar . Teori Tangga Partisipasi Milik Arnstein

- 1) Tangga Pertama Manipulasi (Manipulation) Manipulasi merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, dalam kasus ini pemerintah desa Tegalgondo. Dalam hasil wawancara yang dilakukan pemerintah desa Tegalgondo sering mengundang masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan.
- 2) Tangga Kedua Terapi (Therapy) Terapi merupakan tahap dimana pemegang kekuasaan atau pemerintah memberikan janji dengan berpura-pura melibatkan masyarakat didalam kegiatan tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.. Dalam kasus ini pemerintah desa Tegalgondo mengundang masyarakat untuk melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan.Dan masyarakat sekitar sering mengundang

pemerintah desa Tegalondo untuk hadir diacara yang didakan oleh masyarakat desa. Disini bisa dilihat bahwa adanya hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat kebohongan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengadakan suatu kegiatan.

- 3) **Tangga Ketiga Informasi (Informing)** Para Stakeholder hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan, masyarakat tidak diperkenankan untuk mempengaruhi pendapat atau suatu hasil. Dari kasus ini pemerintah desa Tegalondo sering memberikan informasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan. Terbukti dengn adanya MUSRENBANG yang melibatkan, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Serta perwakilan masyarakat dari tiap RW.
- 4) **Tangga Keempat Konsultasi (Consultation)** Konsultasi merupakan keadaan Dimana masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat masyarakatnya akan diterima. Berdasarkan kasus ini pmerintah desa khsusnya dalam pembangunan, berasal dari usulan masyarakat.
- 5) **Tangga Kelima Penentrman (Placation)** Penenteraman merupakan tahap dimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah membaik karena masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Dalam kasus ini diluar pembangunan masyarakat dapat berleluasa membuat kegiatan.
- 6) **Tangga Kelima Kemitraan (Partnership)** Masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masayarakat dengan pemerintah. Dalam kasus pembangunan di desa Tegalondo sudah menerapkan hal ini.
- 7) **Tangga Ketujuh Delegasi Kekuasaan (Delegated Power)** Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Dalam kasus ini masyarakat belum samapai ke tangga tujuh ini.
- 8) **Tangga Kedelapan Kontrol Masyarakat (Citizen control)** Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam kasus ini masyarakat belum sampai pada tahap ini karena setiap keputusan yang diambil harus sesuai kesepakatan anatra pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis menurut teorinya arnstein dengan menggunakan 8 anak tangga, Maka peneliti mencoba merelevansikan teori tangga Arnstein dengan bagaimana bentuk dan proses partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa Tegalondo. Apabila hasil wawancara tersebut dianalisis menggunakan teori tangga partisipasi milik Arnstein, bentuk dan proses suatu partisipasi masyarakat dan pemerintah desa yang terjadi di Desa Tegalondo menunjukkan partisipasi dengan anak tangga

yang ke 4, 5, dan 6. Dapat diketahui bahwa poin anak tangga tersebut berhubungan dengan hasil pembahasan yang telah ditulis oleh peneliti, karena kedudukan antara pemerintah desa Tegalgondo dan masyarakat sekitar telah sejajar dalam hal menentukan sebuah pembangunan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dari tahapan tahapan dalam pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat terdapat dua tahapan perencanaan, yaitu tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian tahapan ini dapat menjawab fokus penelitian ini. Dan wujud dari partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan telah tercipta diantara pemerintah desa dan masyarakat sekitar.

Dari hasil analisi teori milik Arnstein dapat disimpulkan bahwa dari 8 anak tangga milik Arnstein terdapat tiga anak tangga yang berhubungan dengan isi pembahasan yang dituliskan oleh peneliti. Antara lain dari point anak tangga ke 4, 5, 6

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Randio Alzuhkri. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT DESA GIRIPURNO DALAM MENGEMBANGKAN UMKM BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM (Studi pada Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Giripurno)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
- Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30–41.
- Arnstein R Sherry. (n.d.). *A Ladder of Citizen Participation*.
- Budoyo, S., & Hardiyanti, M. (2021). Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender. *Administrative Law & Governance*, 4(2), 239–251. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11385/5809>
- Digdownseiso, K. (2020). *Teori Pembangunan Daerah*. [http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku Teori Pembangunan.pdf](http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku%20Teori%20Pembangunan.pdf)
- Irawan Soehartono. (1995). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif,” kebijakan dan manajemen publik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 186–190.
- MUHTARDIN. (2021). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA TEMBALAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Mulyana, S. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. 1–87.
- Ricky Wirawan, Mardiyono, dan R. N. (2015). Pembangunan Daerah. *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ricky*, 3(418), 11.
- RISKAYANTI. (2021). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR*

DI DESA ROMANGLASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share : Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13120>